



UNES JOURNAL

Social and Economics Research

Volume 2, Issue 2, December 2017

P-ISSN 2528-6218 E-ISSN 2528-6838

Open Access at: <http://journal.univ-ekasakti-pdg.ac.id>

PRAGMATISME PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo)

PRAGMATISME SELECTIONS IN THE SELECTION OF THE HEAD OF VILLAGE (Study on Village Head Election Year 2015 in Jangur Village Sumberasih Sub-district Probolinggo)

Verto Septiandika

Universitas Panca Marga. E-mail: Verto_upmfisip@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Koresponden

Verto Septiandika

Verto_upmfisip@yahoo.com

Kata kunci:

**pragmatism politik,
pemilihan umum,
pilkades.**

hal: 156 - 163

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pragmatisme Pemilih dalam Pilkades (Studi Perilaku Pilkades 2015 di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis dataterdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pragmatisme politik terjadi dalam empat hal, yakni; 1) Permintaan kompensasi uang secara individu sebesar 50.000 Rupiah hingga 100.000 Rupiah. 2) Permintaan kompensasi uang secara kolektif dikoordinir oleh tim sukses dan atau melalui orang yang memiliki wewenang/pengaruh.3) Permintaan kompensasi barang/jasa secara kolektif formal melalui organisasi desa, seperti karangtaruna, kelompok seni keagamaan atau kelompok tani, secara informal melalui tokoh masyarakat/kyai yang memiliki pengaruh. 4) Barter kepentingan dengan janji jabatan perangkat desa, serta barter dana segar dari pemilik modal/penjudi dengan lahan garapan tanah bengkok.

Copyright © 2017 JSER. All rights reserved

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Correspondent: Verto Septiandika upmfisip@yahoo.com Keywords: political pragmatism, elections, pilkades page: 156 - 163	<i>The purpose of this research is to describe and analyze the Pragmatism of Voters in Pilkades (Study of Conduct of Pilkades 2015 in Jangur Village Sumberasih Sub-district, Probolinggo District), using descriptive-qualitative research method. Data collection is done through interview, observation, and documentation. While the dataterdiri analysis of data reduction, data presentation, and drawing conclusions according to Miles and Huberman. The results conclude that political pragmatism occurs in four things, namely; 1) Individual money compensation demand of 50,000 Rupiah up to 100,000 Rupiah. 2) The demand for monetary compensation is coordinated by a successful team and/or through a person having authority/influence. 3) Demand for compensation of goods/services collectively through formal village organizations, such as karangtaruna, religious arts groups or farmer groups, informally through community leaders/kyai who have influence. 4) Barter of interest with the promise of the position of village apparatus, as well as barter fresh funds from the owners of capital/gamblers with crooked land arable land.</i>

Copyright © 2017 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kekuasaannya dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan yang sangat penting. Demokrasi Pancasila didalamnya menjadikan sifat dan ciri-ciri yang tidak dapat disamakan dengan demokrasi lain di dunia. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi ini cukup jelas tersurat dalam UUD 1945. Konstitusi kita sudah mengakomodir pesta demokrasi secara langsung, bahkan jauh sebelum pemilihan anggota dewan (pemilihan umum/Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan secara langsung, yakni pemilihan kepala desa.

Berkaitan dengan perebutan kursi kekuasaan di level terbawah ini pula, banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing calon Kades. Sebut saja kampanye dari rumah ke rumah, memasang poster ataupun foto (banner) di berbagai tempat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan mencalonkan diri sekaligus juga mengharap dukungan secara tidak langsung. Selain itu, tidak sedikit pula yang memoles citra diri dengan memberi janji-janji kepada rakyat, seperti pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan desa, jembatan, dan atau janji-janji lain yang pada intinya mengambil hati rakyat agar memilihnya. Pendek kata, segala daya dan upaya dikerahkan untuk pragmatisme pemenangan Pilkades baik dengan ataupun tidak memperhatikan nilai-nilai politik yang seharusnya di junjung tinggi oleh masing-masing kandidat.

Bukan sebuah rahasia lagi jika fenomena *money politic* dari para calon Kades dengan memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar memilihnya merupakan cara-cara

yang dianggap “jitu” untuk memenangkan pertarungan. Tidak hanya itu, kampanye hitam juga kerap dilancarkan untuk menjegal lawan politik yang dinilai kuat. Di sisi lain, masyarakat sebagai pemegang kuasa melalui setiap suaranya (one man one vote), seolah sudah terbiasa dengan fenomena pragmatisme politis ini. Tidak sedikit pula rakyat yang secara ekonomi masih lemah kemudian terjebak pada praktek politik transaksional. Mereka beranggapan; siapa kandidat yang memberi dengan jumlah paling besar, dialah calon yang akan dipilih. Tidak jarang pula yang pendidikan dan kedewasaan politiknya rendah berasumsi; “Jika tidak ada yang memberi uang, kami tidak akan datang ke TPS untuk mencoblos.”

Namun, di balik itu semua penulis yakin masih ada rakyat maupun calon pemimpin desa, khususnya di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang mempertimbangkan pilihan dan menjalankan aksi-aksi politiknya tidak semata pada alasan pragmatisme melainkan jauh lebih mulia dari itu, dimana nilai-nilai politik di junjung tinggi dan digunakan sebagai dasar untuk memilih calon pemimpin ideal, khususnya kepala desa, yang akan membawa rakyat pada keadaan lebih baik kesejahteraannya, posisi tawarnya, hingga harkat dan martabatnya.

Bertens (2001:142) menyebutkan tentang macam-macam nilai adalah "nilai ekonomis, nilai estetis, nilai moral, nilai dasar, dan sebagainya". Sedangkan nilai dasar merupakan syarat untuk mewujudkan nilai-nilai yang lain. Nilai dasar antara lain nilai buruk, layak tidak layak, nyaman tidak nyaman dan sebagainya. Menurut Koyan, ada dua nilai yaitu nilai ideal dan nilai aktual. Nilai "ideal adalah nilai-nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai aktual adalah nilai yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari". (dalam Rohmat, 2004:11) Masih menurut buku yang sama, Kohlberg mengklasifikasikan nilai menjadi dua, yaitu "nilai obyektif dan nilai subyektif". Nilai obyektif atau nilai universal yaitu nilai yang bersifat intrinsik, yakni nilai hakiki yang berlaku sepanjang masa secara universal. Termasuk dalam nilai universal ini antara lain hakikat kebenaran, keindahan, dan keadilan. Adapun nilai subyektif yaitu nilai yang sudah memiliki warna, isidan corak tertentu sesuai dengan waktu, tempat dan budaya kelompok masyarakat tertentu. (Ibid.,:15).

Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintahan tersebut akan sulit ditegakan. Menurut Asykuri (2003:79) nilai-nilai politik antara lain, adalah kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi) menghormati orang kelompok lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan, dan kepercayaan. Disamping nilai-nilai tersebut di atas Asykuri (2003:79) juga menegaskan diperlukan pula sejumlah kondisi agar nilai-nilai tersebut dapat ditegakan sebagai pondasi demokrasi. Kondisi ini sebagai berikut: a) Kebebasan menyatakan pendapat, b) Kebebasan berkelompok, c) Kebebasan berpartisipasi, d) Kesetaraan warganegara, e) Kesetaraan gender, f) Kedaulatan rakyat, dan g) Rasa percaya.

Menurut Sosialismanto (2001:191) dalam bukunya yang berjudul “Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa”, yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat. Biasanya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pemilihan kepala desa dasar hukumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah", Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang "Desa" serta Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 31 Tahun 2007 tentang "Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian kepala desa dan perangkat desa".

Walapun kenyataannya, belakangan ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh jika kades terpilih jarang ngantor di balai desa sehingga sulit ditemui, masyarakat yang hendak menemui kades di rumahnya di bilang tidak ada, masyarakat yang membutuhkan *ambulance* desa masih di tarik uang BBM. Di kalangan pendukungnya sendiri juga menyisakan kekecewaan, seperti janji bagi salah satu anggota keluarga pendukung untuk menjadi perangkat desa, ulu-ulu air, dan sebagainya tinggallah janji semata. Lebihlebi bagi oposisi, nasibnya lebih buruk lagi, seperti kebutuhan untuk sengketa tanah yang terbengkalai atau sangat lamban ditangani, pemecatan sepihak dari unsur sebagai perangkat desa, ulu-ulu air, dan sebagainya. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, kemudian penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pragmatisme Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meningkatkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus yang merupakan strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat dan mendalam suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder dari kantor Desa Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan kegiatan perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, dan triangulasi data. Kegiatan analisis data di mulai dari reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini dikelilingi oleh Gunung Semeru, Gunung Argopuro, dan Pegunungan Tengger. Kabupaten Probolinggo mempunyai semboyan "Prasaja Ngesti Wibawa".

Gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.375 Dusun, 1.643 RW dan 5.869 Rukun Tangga. Pada periode empat tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo terus meningkat hingga mencapai 1.108.136 jiwa.

Dengan luas wilayah sekitar 1.696,16 km², maka kepadatan penduduk ini lebih tinggi di bandingkan tiga tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai 616 jiwa per km² (2011), 636 jiwa per km² (2012), dan 631 jiwa per km² (2013). Sedangkan perkembangan jumlah penduduk total dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.

Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki cenderung mengalami peningkatan, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan hampir sama. Kecamatan Sumberasih merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Probolinggo dengan kepadatan 1.966 jiwa per km². Kecamatan terpadat kedua adalah Kecamatan Kraksaan yang merupakan ibukota Kabupaten dengan kepadatan 1.735 jiwa per km². Tingkat pertumbuhan penduduk tercepat adalah di Kecamatan Kraksaan yakni sebesar 1,4 persen per tahun.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berdasarkan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2007 mencapai angka sebesar 5,97 %, tahun 2008 turun menjadi 5,78 %, tahun 2009 turun menjadi 5,72 %, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,19 %, sedangkan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 6,23 % dan pada tahun 2012 mencapai 6,47 % (angka sementara).

Gambaran Umum Desa Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Adapun Visi Desa Jangur adalah "Mewujudkan Desa Jangur Menjadi Desa Mandiri Melalui Bidang Pertanian, Industri Kecil Dan Sosial Budaya". Sedangkan Misi Desa Jangur adalah sebagai berikut.

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
2. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
3. Meningkatkan usaha Pertanian.
4. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
5. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

Desa Jangur terletak di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan luas wilayah administratif sebesar 157 Ha. Desa ini terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pelle, Dusun Pacar, Dusun Talang, dan Dusun Kelompang. Batasbatas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sumurmati
- Sebelah Timur: Desa Muneng
- Sebelah Selatan: Desa Muneng
- Sebelah Barat : Desa Mentor

Jumlah penduduk Desa Jangur pada tahun 2014 tercatat sebanyak 3.583 jiwa, terdiri atas 1.765 jiwa laki-laki dan 1.818 jiwa perempuan yang tersebar di 4 Dusun. Berikut data jumlah penduduk di tiap dusun di Desa Jangur sesuai hasil pendataan pada tahun 2014.

Pragmatisme Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

1. Pragmatisme dalam bentuk permintaan uang secara individu.

Temuan penelitian ini di lapangan juga menguatkan apa yang dikatakan oleh Sunardjo (2004), dimana pragmatisme atau bahkan politik uang menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Dampak lebih buruknya, terjadilah siklus uang untuk politik dan politik untuk uang. Dalam lingkaran setan yang demikian rakyat lah yang menjadi korban. Sekilas memang seperti rakyat yang diuntungkan karena adanya momen Pilkades dianggap sebagai ajang mencari penghasilan. Ini merupakan pemikiran yang menurut penulis sangat lah awam. Kebanyakan dari mereka tidak mempedulikan nilai-nilai dari demokratisasi yang seharusnya dijadikan rambu-rambu dalam memilih. Dampak lainnya ialah masyarakat akan merasa berhutang budi kepada mereka yang telah memberikan sesuatu melalui gelaran Pilkades. Ini artinya hak asasi seseorang dalam menentukan pilihan menjadi terkebiri.

2. Pragmatisme dalam bentuk permintaan uang secara kelompok

Tidak hanya dalam tingkatan individu, ternyata secara kolektif adanya tabur uang juga dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang memiliki kriteria pemegang kekuasaan, orang kaya, memiliki banyak pengikut (karyawan/buruh tani), memiliki pengaruh tertentu di desa, mempunyai wewenang hingga orang yang disegani/ditakuti karena faktor kedekatannya dengan dunia hitam, yakni bajingan, sampah masyarakat, maling, oknum aparat yang membekingi perjudian seolah memperkeruh keadaan. Bahkan orang yang tidak dengan criteria di atas namun hanya memiliki kepiawaian dalam berkomunikasi untuk menghubungkan keinginan calon Kades dengan kelompok masyarakat pun ternyata memiliki perannya yang signifikan.

Karena sifatnya sudah berkelompok yang mengarah pada pembagian suara secara kolektif per wilayah blok dan atau dusun dalam suatu desa, maka pragmatisme politik dalam wujud ini dapat memberikan dampak terhadap perpecahan antar masyarakat. Bagaimana tidak, jika telah nyata ada "kesepakatan" bagi dusun/blok tertentu namun di sisi lain diketahui hanya diambil uangnya saja, maka ini akan menjadikan munculnya kecurigaankecurigaan dan sakit hati dari calon Kades termasuk tim suksesnya berikut para pendukungnya yang loyal yang mana hal ini bisa berujung pada terjadinya konflik horizontal.

Walau bagaimanapun bentuk praktek seperti ini tetap menjadi yang paling diharapkan oleh kedua belah pihak. Bagi calon Kades, hal ini akan memudahkan dalam memperhitungkan kekuatan suara, sedangkan bagi pihak yang lain tentunya akan dapat secara akumulatif memegang sumber daya (uang) dari calon Kades dengan banyak untuk di bagi-bagikan kepada masyarakat. Transaksi politik secara kolektif ini juga tidak bisa disamakan dengan transaksi ekonomi. Dalam ketentuan hukum ekonomi, ada perbedaan harga jika kita membeli barang dengan cara ecer atau partai (banyak), yang tentunya pembelian dengan cara partai akan mendapatkan harga yang lebih murah. Namun dalam transaksi politik hal tersebut tidak berlaku. Jika hitungan pemberian uang per individu ditetapkan lima puluh ribu, maka pemberian dengan cara kolektif (partai) juga tetap sama. Sekali lagi, yang dikejar adalah terkumpulnya suara secara kolektif. Dengan demikian, bisa dibayangkan berapa banyak uang yang harus ditransaksikan. Maka hal ini menurut Ndraha (2001) sebagai sebuah keadaan sistem politik atau pun demokrasi yang berbiaya tinggi (*high cost politic*), baik itu biaya kampanye, sosialisasi diri, pencitraan, dan lain-lain termasuk didalamnya biaya untuk membeli suara rakyat.

3. Pragmatisme dalam bentuk barang/jasa

Dalam taraf ini terekam pula bagaimana unsur politisi atau calon Kades secara agresif mendekati kelompok-kelompok masyarakat tertentu khususnya yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti tokoh masyarakat ataupun kyai, pemilik pondok pesantren, dan lain-lain. Maka tidak berlebihan kiranya jika dalam taraf ini kita perlu untuk lebih waspada terhadap sikap-sikap pragmatis karena sudah menjadi perilaku dalam berpolitik.

Sebagaimana diungkap pula oleh Ndraha sudah selayaknya diwaspadai jika pragmatisme mulai menjangkiti seseorang atau politisi. Terlebih berbahaya jika pragmatisme ini kemudian menjadi perilaku dalam berpolitik yang akan menempatkan kepentingan politik dan kekuasaan sebagai *the end* (arah akhir atau tujuan akhir) sehingga idealisme dan ideologi politik menjadi sesuatu yang basi.

4. Pragmatisme dalam bentuk barter kepentingan

Praktek ini ternyata juga sudah lama diterapkan dalam setiap ada gelaran Pilkades. Barter suara keluarga tertentu dengan posisi tertentu dalam jabatan perangkat desa tentunya tidak akan melihat spesifikasi dari calon orang yang akan mengisi. Hal ini sungguh jauh dari sebuah konsep "*the right man on the right place*" apalagi jabatan yang akan disandang merupakan jabatan perangkat desa yang nantinya akan berurusan secara langsung dengan masyarakat melalui pemberian pelayanan, pengaturan, dan sebagainya. Tentu hal ini akan sangat jauh dengan kata profesionalisme.

Data yang mengungkap bahwasanya tujuan mulia dari diadakannya Pilkades kini telah memudar, tergantikan oleh tujuan-tujuan yang bersifat tentatif yang serba instan, dimana masyarakat sudah paham jika mereka yang mencalonkan diri kerap melakukan pencitraan diri, berperangai baik di muka namun akan meninggalkan rakyat jika sudah terpilih. Sebaliknya, sangat sedikit masyarakat yang memilih menggunakan hati nurani, melihat sisi baik dan buruk dari masing-masing calon Kades yang ada, tanpa tergoda oleh iming-iming politik yang sifatnya pragmatis. Artinya, sikap politik pemilih tidak tumbuh sebagai akibat kuatnya ideologi, atau setidaknya kuatnya cita-cita moral yang ditumpukan kepada para calon oleh kalangan pemilih. Ideologi atau cita-cita moral yang menjadikan Pilkades tetap berada dijalanrya memudar tergantikan oleh manfaat praktis berupa material dan kepentingan. Hal ini tentu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ndraha (2001) bahwa masyarakat merasa selama ini hanya diperalat, dijadikan obyek dan komoditas politik bahkan alat tawar demi mendapat "harga". Maka ketika ada kesempatan, sebagian masyarakat pun menjadikan suaranya yang ber-"harga" tersebut untuk mendapat manfaat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari data hasil penelitian yang sudah di olah dan di bahas pada bab sebelumnya maka penulis dengan karya ilmiah yang berjudul; "Pragmatisme Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pragmatisme dalam bentuk permintaan kompensasi uang secara individu dilakukan secara langsung dengan cara bertamu ke rumah calon, besarnya adalah lima puluh ribu rupiah.

2. Pragmatisme dalam bentuk permintaan kompensasi uang secara kolektif dikoordinir oleh tim sukses atau melalui orang yang memiliki wewenang, pengaruh di Desa Jangur sebesar antara lima puluh hingga seratus ribu rupiah.
3. Pragmatisme dalam bentuk permintaan kompensasi barang atau jasa secara kolektif dilakukan baik secara formal melalui organisasi desa, seperti karang taruna, kelompok seni keagamaan atau kelompok tani. Bisa pula dilakukan secara informal dengan mendekati tokoh masyarakat/kyai yang memiliki pengaruh.
4. Pragmatisme dalam bentuk barter kepentingan dilakukan dengan anggota keluarga yang memiliki keluarga besar, yakni adanya pertukaran suara dengan jabatan sebagai perangkat desa. Yang lainnya adalah dilakukan dengan pemilik modal/penjudi, dengan perjanjian setelah menang tanah bengkok akan di garap oleh pemilik modal hingga hutang terlunasi.

Saran

Dari penjelasan yang diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan peneliti sehubungan dengan "Pragmatisme Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Jangur Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)" antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Calon Kepala Desa

- a. Bagi pihak-pihak yang akan mengadu peruntungan dalam Pilkades hendaknya jauh-jauh hari mulai menabur benih-benih kebaikan dan selalu memomorsatkan nilai-nilai politik yang hingga saat ini diyakini sebagai jalan terbaik dan tidak memakan banyak biaya.
- b. Hindari jalan pintas yang sifatnya mengumbar pragmatisme politik karena jika kalah, jelas kerugian materil yang tidak sedikit harus ditanggung. Sedangkan jika menang, pasti akan memikirkan bagaimana supaya balik modal.
- c. Bersaing secara sehat, merebut hati pemilih dengan jalan yang dibenarkan, tentu akan membawa pada berjalannya roda pemerintahan desa yang bersih, transparan dan berwibawa kelak jika terpilih.

2. Bagi Masyarakat

- a. Jadilah pemilih yang cerdas tanpa mengharap imbalan apapun dari calon Kades atau membuat keputusan yang sifatnya instan dengan menempatkan hal-hal yang bersifat pragmatis di atas keputusan yang lain.
- b. Tentukan pilihan sesuai hati nurani dengan melihat sisi kepribadiannya, mungkin pula tingkat pendidikannya, kontribusinya terhadap desa serta perangai dari masing-masing calon Kades jauh hari sebelum Pilkades dilaksanakan agar tidak salah pilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Armin, Adi. 2003. *Filsafat Pragmatisme*. Jakarta: Teraju.
- Bertens, K., 2001, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, HM Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Rohmat, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung.
- Sunardjo, Unang, 2004, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; "Pemerintahan Daerah".